

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG  
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI**

**Ngakan Made Agung Aditia<sup>1</sup>  
Ni Putu Martini Dewi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: [poyok25@gmail.com](mailto:poyok25@gmail.com) / telp: +62 81236134241

**ABSTRAK**

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan sebagian warga negara belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali Tahun 2010-2015. Penelitian ini menggunakan data skunder, melalui studi dokumentasi dan analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali tahun 2010-2015. Secara parsial pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali tahun 2010-2015. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali tahun 2010-2015. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali tahun 2010-2015.

**Kata Kunci:** *pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, dibidang kesehatan, dibidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat*

**ABSTRACT**

*The problem of social welfare that develops shows that some citizens have not fulfilled their basic needs independently in poverty condition. This study aimed to determine simultaneously and partially the influence of government spending in the field of education, health and economics towards the level of welfare of society in the Province of Bali Year 2010-2015. This study used secondary data, through documentation and multiple linear regression data analysis. The results showed that simultaneously government expenditures in education, health, and economics have significant effect on the level of welfare. Partially, government expenditures of education have positive and significant influence to the welfare. Government health expenditures have a positive and significant impact on the welfare. Government economic expenditure has a positive and significant impact on the welfare level of the people of Bali Province in 2010-2015.*

**Keywords:** *government expenditures in the field of education, health, economy, community welfare*

## **PENDAHULUAN**

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah, maupun oleh organisasi non pemerintah. Program-program tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hutasuhut, 2005)

Pembangunan merupakan suatu proses dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro, 2000). Lebih lanjut disebutkan bahwa proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu (1) peningkatan ketersediaan serta perluasan

distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan, (2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan, (3) perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yaitu dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (Todaro, 2000).

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia saat ini menunjukkan hasil yang lebih baik, meskipun masih menghadapi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, penyalahgunaan napza, korban tindak kekerasan dan korban bencana alam, serta bencana sosial. Permasalahan tersebut perlu penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan, agar tidak memperburuk kondisi kemiskinan struktural, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar. Permasalahan kesejahteraan sosial yang

berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan (Hukom, 2014). Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan social dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan pendidikan, sandang pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PMKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan social dasar.

Berkenaan dengan hal tersebut dan kalau dihubungkan dengan pembangunan manusia di Indonesia selama kurun waktu enam Repelita dan bahkan sampai sekarang nampaknya belumlah mendapatkan perhatian sebagaimana yang di harapkan. Hal ini tercermin dari masih rendahnya peringkat indikator pembangunan manusia Indonesia di dunia. Setelah adanya arus reformasi yang demikian deras serta tuntutan krisis yang sudah tidak dapat dibendung lagi, banyak orang kembali mengangkat isu tentang hakekat pembangunan yang selama ini dilaksanakan, yang tidak terpusat pada manusia sebagaimana dikehendaki oleh paradigma baru pembangunan manusia.

Keberhasilan pesta demokrasi di Indonesia dianggap bahwa Indonesia berhasil dalam pengembangan dimensi kebebasan berdemokrasi, tapi dalam pemenuhan kebutuhan yang lebih mendasar, Indonesia bisa dikatakan gagal. Seperti yang tertulis dalam Indonesia *Human Development Report 2004* sebagai berikut “Indonesia menyambut kebangkitan kembali demokrasi, dan ini merupakan kesempatan bagi suara rakyat didengarkan. Walaupun demokrasi telah menawarkan orang banyak pilihan baru, tetapi tidak terlihat membawa keuntungan ekonomi yang nyata. Masyarakat miskin Indonesia sudah mempunyai banyak saluran untuk dapat mengekspresikan pendapat mereka. Tetapi mereka tidak mendapatkan peluang secara penuh untuk mengembangkan kapasitas yang dimiliki. Contohnya, lebih dari separuh anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun dan sekitar 25% anak-anak kurang makan. Jutaan orang mengalami kebebasan politik tapi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, mereka mengalami kendala”. Pengertian pembangunan manusia dari sisi pendekatan hak adalah bukan hanya sekedar memperoleh hak kebebasan politik, tapi yang paling esensial adalah hak untuk hidup sehat, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk hidup layak.

Berberapa indikator tingkat kesejahteraan telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Pada mulanya studi mengenai kesenjangan kesejahteraan antar daerah umumnya menggunakan indikator *output* ekonomi rata-rata per kapita sebagai proksi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kritik terhadap penggunaan indikator tersebut adalah berkaitan dengan isu mengenai

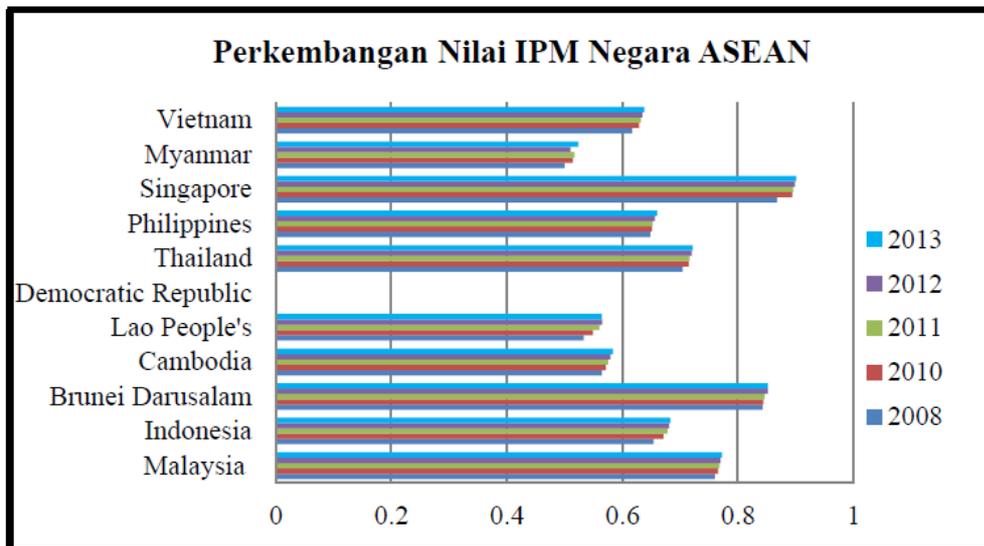
ketidaktentuan atau ketidakpastian hubungan antara *output* ekonomi suatu wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut. Suatu wilayah mempunyai *output* ekonomi tinggi, namun tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah itu mungkin saja rendah. Dalam konteks ini pemahaman tentang kesejahteraan wilayah (*place prosperity*) tidak sama dengan kesejahteraan masyarakat wilayah (*people prosperity*). Perbedaan ini sering dikaitkan dengan “pembangunan di daerah” dan “pembangunan daerah”. Di samping itu, penggunaan indikator *output* ekonomi rata-rata perkapita juga dianggap menyederhanakan pengertian kesejahteraan. Kesejahteraan menyangkut berbagai dimensi sehingga kurang tepat untuk disederhanakan menjadi satu dimensi gabungan atau komposit ekonomi saja. Penggunaan indikator komposit menghadapi tantangan dari segi penerimaan secara luas. Tanpa penerimaan secara luas, maka hasil suatu studi sulit untuk diperbandingkan dengan hasil studi lainnya.

Berbagai studi terdahulu, mengukur kesenjangan berdasarkan formulasi yang diturunkan dari kurva distribusi Lorenz. Dengan formulasi tertentu, kurva distribusi Lorenz digunakan untuk menghitung indeks kesenjangan Gini, Williamson, Theil, dan sebagainya. Saat ini penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang menggambarkan kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat

pendidikan dan standar hidup layak (Hariawan dan Swaningrum, 2015). Dalam penelitian ini digunakan indeks pembangunan manusia sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk ranking kesejahteraan suatu negara atau daerah.

IPM adalah salah satu hal yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan (Adelfina dan Jember, 2016). IPM memberi wawasan pembangunan yang lebih luas karena pembentukannya didesain untuk memfokuskan perhatian pada aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan, sehingga bisa mengetahui perbandingan kinerja pembangunan manusia antar negara maupun antar daerah (Kuncoro, 2013:225). Perkembangan nilai IPM Negara ASEAN seperti pada Gambar 1.

**Gambar 1 Perkembangan nilai IPM Negara ASEAN**



Sumber: UNDP, 2014

Gambar 1 menunjukkan bahwa fenomena peningkatan nilai IPM di negara ASEAN pada tahun 2008-2013. IPM di Indonesia termasuk dalam kategori *medium human development* dengan nilai IPM pada tahun 2013 sebesar 0,68.

Menurut BPS (2014), Indonesia menduduki peringkat ke-108 dari 187 negara di dunia. Negara ASEAN yang tergolong pada *high human development* yaitu negara Singapura sebesar 0,90 menduduki peringkat ke-9 dari 187 negara di dunia. Investasi sumber daya manusia (*human investment*) dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mempengaruhi produktivitas masyarakat (Dewi dan Sutrisna, 2014).

Nilai IPM dapat dijadikan sebagai tolak ukur perbandingan kinerja pembangunan di setiap negara. Kinerja pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya optimal karena posisi Indonesia belum mampu menembus peringkat ke-100 besar di dunia. Indonesia berada pada peringkat ke-6 di antara Negara negara ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina tetapi masih di atas peringkat negara Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Posisi peringkat IPM di Indonesia merupakan akumulasi dari total nilai IPM setiap provinsi di Indonesia. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010 - 2015 seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2015**

No.	Kab/Kota	IPM (Satuannya Indeks)						Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jembrana	66.70	67.53	67.94	68.39	68.67	69.66	68.15
2	Tabanan	70.68	71.35	71.69	72.31	72.68	73.54	72.04
3	Badung	75.84	76.66	77.26	77.63	77.98	78.86	77.37
4	Gianyar	71.45	72.50	73.36	74.00	74.29	75.03	73.44
5	Klungkung	66.01	67.01	67.64	68.08	68.3	68.98	67.67
6	Bangli	63.43	63.87	64.53	65.47	65.75	66.24	64.88
7	Karangasem	60.58	61.60	62.95	63.70	64.01	64.68	62.92
8	Buleleng	66.98	67.73	68.29	68.83	69.19	70.03	68.51
9	Denpasar	79.19	79.77	80.45	81.32	81.65	82.24	80.77
	<b>Bali</b>	<b>70.10</b>	<b>70.87</b>	<b>71.62</b>	<b>72.09</b>	<b>72.48</b>	<b>73.27</b>	<b>71.74</b>

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2015*

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi dari tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan, rata-rata tertinggi dari tahun 2010-2015 dimiliki oleh kota Denpasar sebesar 80,77, disusul oleh kabupaten Badung sebesar 77,37, Gianyar sebesar 73,44, Tabanan sebesar 72,04, Buleleng sebesar 68,51, Jembrana sebesar 68,15, Klungkung sebesar 67,67, Bangli sebesar 64,88 dan terakhir kabupaten Karangasem sebesar 62,92. Hal ini membuktikan upaya sungguh-sungguh kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun belum tercapai sesuai dengan harapan.

Kebanyakan negara-negara berkembang, khususnya seperti Indonesia, cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun di sisi lain dihadapkan pada persoalan rendahnya pembangunan manusia dan tingginya angka kemiskinan (BPS, 2013). Pencapaian pembangunan manusia dalam suatu negara mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Undang-Undang No.23 tahun 2014 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan strategi baru memasuki era reformasi total dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas (Winarno, 2008:38). Oleh karena itu, diharapkan setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan *human resources* yang berkualitas agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam perekonomian secara nasional.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, diberlakukannya otonomi daerah merupakan strategi dalam merespons tuntutan masyarakat di daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of powers*, *distribution of incomes*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam memperkokoh perekonomian nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur dengan baik dan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi sentral (*central position*) dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Pada hakekatnya, anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi

kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah. Ada kecenderungan kuat bahwa daerah-daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya sangat menikmati kekuasaan yang semakin besar, tapi hal ini tidak diimbangi dengan tanggung jawab dan transparansi yang seimbang. Seimbang dalam arti harmonisasi antara Perlu pemantauan di daerah-daerah guna menyisihkan dana dari APBD nya yang cukup untuk pendidikan dasar, kesehatan dasar dan pelayanan sosial (Muhammad, 2003).

Salah satu perangkat yang selama ini banyak digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan peran tersebut adalah perangkat kebijakan fiskal. Di antara instrument kebijakan fiskal tersebut, ada instrumen dalam bidang pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, irigasi, transportasi, dan sebagainya (Sasana, 2009). Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia (Sahrah, 2007). Pengalokasian anggaran pendidikan ini menjadi hal penting karena pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi (Treena Wu,2013). Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam proses perbaikan taraf hidup (Kurniawan, 2016). Tingkat pendidikan juga berpengaruh

terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan suatu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan (Silva dan Sudaarno, 2008). Anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil perkapita (Delavallade, 2006).

*International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa kebijakan memberikan pengalokasian lebih besar pada program pendidikan dasar akan memberikan efek marginal yang terbesar pada pembangunan manusia (Jha *et al.*, 2002). Berdasarkan pendapat tersebut, maka pada penelitian ini akan dimasukkan kebijakan proporsi pengalokasian pengeluaran pemerintah bidang pendidikan untuk masing-masing program yang terdiri dari program pendidikan sekolah (taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah), program pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan adalah salah satu aspek penting bagi proses pembangunan karena berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan manusia (Purnami, 2016).

Keberhasilan Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah tidak hanya ditentukan oleh berapa besarnya tingkat *Gross Domestic Bruto*(PDB) atau PDRB tetapi juga harus dilihat atau diukur dari sejauh mana pembangunan tersebut dapat diterjemahkan kedalam beberapa aspek sehingga muncul suatu kondisi masyarakat sejahtera. Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indeks pembangunan manusianya (IPMnya). Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam pembangunan nasional/daerah. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan pemerintah

dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia. Salah satu bukti keseriusan pemerintah tersebut adalah lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan/bukti konkrit peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Sektor pengeluaran pemerintah yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo dkk (2011), dengan judul analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dan Khasanah (2011), dengan hasil sebagai berikut 1) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY 2) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY 3) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY 4) keberhasilan pembangunan manusia yang terjadi di DIY lebih banyak ditentukan oleh *sense of education* masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat itu mandiri. Apalagi dengan masyarakat yang sangat terbuka

terhadap perubahan dari luar, membuat masyarakat Yogyakarta lebih peka terhadap tuntutan dari luar; 5) Pemerintah Provinsi DIY belum memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya pembangunan manusia di wilayahnya. Rendahnya komitmen pemerintah tersebut selain dibuktikan dengan rendahnya alokasi pengeluaran sektor publik yang menunjang pembangunan manusia baik secara absolut dan relatif, juga dibuktikan dengan nilai anggaran yang memiliki fluktuasi sangat tinggi dan tidak pasti.

Penelitian Treena Wu (2013), dengan hasil bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap IPM hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk sektor tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya. Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia diuji oleh Astri (2012). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Septiana dkk. (2015) dengan hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara.

Solusi teori yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan disekitar manusia atau manusia disekitar pembangunan, maka dapat disampaikan bahwa yang menjadi kata kuncinya adalah manusia. Dalam hal ini manusia merupakan penggerak pembangunan disetiap Negara didunia. Hal ini dapat ditempuh dengan memadainya sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu Negara dengan terus mencari generasi yang mempunyai intelektual spesial dalam hal ini atau dengan kata lain mencari para ahli dalam pembangunan tersebut. Pelayanan publik yang mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik ataupun penentangan kepada pemerintah sehingga menyebabkan tidak terealisasinya program yang dibuat dengan maksimal.

Perlu adanya perhatian khusus untuk hal ini, dikarnakan masalah-masalah yang telah disebutkan di atas merupakan hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan program maupun aturan pemerintah yang menuju kearah pembangunan manusia. Di pihak lain juga harus ada pembenahan di sektor perangkat pemerintahan agar sasaran dan tujuan yang ditujukan tidak meleset, dalam kata lain suntikan imun kepada yang membutuhkan haruslah terpusat kepada sasaran sehingga masyarakat merasakan pelayanan publik yang diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk para pejabat pemerintah selaku pelaksana teknis program yang mempunyai tugas antara lain mengendalikan pelaksanaan kegiatan,

melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan menyiapkan dokumen dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan program yang dijalankan.

Berdasarkan uraian dan beberapa penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor terkait pembangunan manusia ada yang belum optimal dan hasil yang satu dengan lainnya ada yang tidak konsisten. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa IPM Provinsi Bali menduduki peringkat 15 dari IPM 34 Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa provinsi menunjukkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena kesejahteraan merupakan tujuan semua bangsa dan untuk mencapai kesejahteraan itu harus melalui berbagai upaya atau tantangan di setiap bangsa. kesejahteraan secara umum sampai saat ini belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa indonesia khususnya masyarakat di bali. Sifat kesejahteraan itu tidak konstant atau tetap bisa naik ataupun turun. Atas dasar hal tersebutlah penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul ”Pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali”.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, 2) untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali. Dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan alasan sebagai provinsi Bali sebagai salah satu daerah di Indonesia yang oleh pemerintah daerahnya telah dilaksanakan program-program pembangunan dan oleh karenanya perlu diketahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali dan keterbatasan dana, waktu dan tenaga termasuk menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian ini. Obyek penelitian ini adalah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM). Tingkat kesejahteraan Masyarakat (dengan IPM), yaitu suatu indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok. IPM yang digunakan adalah hasil perhitungan BPS dengan rentang skor 1-100. Indeks Pembangunan Manusia *Human Development Report* terbitan BPS, Bappenas dan UNDP tahun 2010 - 2015, dalam satuan Indeks (0-100).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah jumlah realisasi anggaran pembangunan bidang pendidikan pada kabupaten/kota seProvinsi Bali tahun 2010 - 2015, dalam satuan rupiah. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi adalah jumlah realisasi anggaran pembangunan bidang ekonomi pada kabupaten/kota seProvinsi Bali tahun 2010 - 2015, dalam satuan rupiah. Menurut Yefriza (2015), pengeluaran pemerintah di bidang

kesehatan menjadi faktor penting dalam penurunan angka kematian bayi dan anak serta peningkatan angka harapan hidup.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Namun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data panel yang merupakan kombinasi data runtut waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross section*). Observasi meliputi 9 daerah kabupaten/kota seProvinsi Bali Tahun 2010 - 2015, sehingga diperoleh 45 observasi. Data tersebut berupa laporan pengeluaran pemerintah perkapita pada bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan kabupaten/kota seProvinsi Bali, data Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota seProvinsi Bali, serta jumlah penduduk di kabupaten/kota seProvinsi Bali. Data dan informasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bappeda Provinsi Bali, Publikasi BPS, Bappenas dan UNDP :*Indonesia Human Development Report*.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data panel menggunakan *software* komputer *Eviews 7*. Spesifikasi model empiris analisis regresinya menurut Wirawan (2014) dapat digunakan model regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota seProvinsi Tahun 2010, -2015 (Skor 1-100).
- X<sub>1</sub> = Nilai pengeluaran pemerintah bidang ekonomi kabupaten/kota seProvinsi Bali pada tahun ke t. Tahun 2010, -2015 (Rp).
- X<sub>2</sub> = Nilai pengeluaran pemerintah bidang kesehatan kabupaten/kota seProvinsi Bali pada tahun ke t. Tahun 2010, -2015 (Rp).
- X<sub>3</sub> = Nilai pengeluaran pemerintah bidang pendidikan kabupaten/kota seProvinsi Bali pada tahun ke t. Tahun 2010, -2015 (Rp).

$\beta_0$  = data konstanta,  
 $\beta_1 \dots \beta_3$  = parameter  
 $\mu$  = tingkat gangguan (*disturbance*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi ( $X_1$ ), kesehatan ( $X_2$ ), dan pendidikan ( $X_3$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali ( $Y$ ) dengan menggunakan SPSS.22. Hasil analisis akan ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.66113	4.223014	10.10206	0.0000
Ekonomi (X3)	0.005493	0.000587	9.364025	0.0000
Kesehatan (X2)	0.009820	0.004007	2.450774	0.0178
Pendidikan (X1)	0.009291	0.002200	4.222815	0.0001
R-squared	0.763403	Mean dependent var		70.63889
Adjusted R-squared	0.749208	S.D. dependent var		5.631938
S.E. of regression	2.820428	Akaike info criterion		4.982842
Sum squared resid	397.7408	Schwarz criterion		5.130174
Log likelihood	-130.5367	Hannan-Quinn criter.		5.039662
F-statistic	53.77672	Durbin-Watson stat		1.622032
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2016

Hasil analisis menunjukkan persamaan model regresi variabel terikat dan bebas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \hat{Y} &= 42,661 - 0,005X_1 - 0,009X_2 + 0,009X_3 \\
 Se &= (4,223) \quad (0,000) \quad (0,004) \quad (0,002) \\
 t &= (10,10) \quad (9,364) \quad (2,450) \quad (4,222) \\
 Sig &= (0,000) \quad (0,000) \quad (0,017) \quad (0,000) \\
 R^2 &= 0,763 \\
 F &= 53,776 \quad \text{nilai Sig. } F = 0,000
 \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat diuraikan koefisien regresi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan ( $X_1$ ) menunjukkan tanda

positif dengan nilai koefisien sebesar 0.009291, ini berarti bahwa bertambahnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan ( $X_1$ ) sebesar satu persen maka akan terjadi peningkatan nilai IPM (Y) sebesar 0,009291 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ( $X_2$ ) menunjukkan tanda positif dengan nilai koefisien sebesar 0,009820, ini berarti bahwa, bertambahnya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ( $X_2$ ) sebesar satu persen maka akan terjadi peningkatan nilai IPM (Y) sebesar 0,009820 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah bidang ekonomi ( $X_3$ ) menunjukkan tanda positif dengan nilai koefisien sebesar 0,005493, ini berarti bahwa, bertambahnya pengeluaran pemerintah bidang ekonomi ( $X_3$ ) sebesar satu persen maka akan terjadi peningkatan nilai IPM (Y) sebesar 0, 005493 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan.

Teknik analisis regresi linier berganda memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini digunakan metode pengujian dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual ( $r^2$ ) dengan nilai determinasi secara serentak ( $R^2$ ) seperti pada Tabel 3. Jika Nilai koefisien determinasi individual ( $r^2$ ) lebih tinggi dari nilai determinasi secara serentak ( $R^2$ ) berarti ada gejala multikolinieritas.

**Tabel 3 Hasil uji Multikolinieritas**

Variabel Dependen	Variabel Independen	Nilai r square ( $r^2$ )
Kesejahteraan Masyarakat (IPM)	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan	0,581678
	Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan	0,571355
	Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi	0,185028
Nilai $R^2$	0,763403	

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai koefisien  $r^2$  yang diperoleh seluruhnya bernilai lebih kecil dari pada nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

**Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedasticity dengan Uji White**

F-statistic	0.691467	Prob. F(9,44)	0.7127
Obs*R-squared	6.691189	Prob. Chi-Square(9)	0.6692
Scaled explained SS	3.569167	Prob. Chi-Square(9)	0.9374

*Sumber:* Hasil Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa Obs\*R-squared sebesar 6.691189 lebih kecil dari nilai Chi-square tabel pada df 52 dan probabilitas 0,05 yaitu sebesar 69,83216, hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 53.777 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,79 dengan probabilitas/signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$ , artinya secara simultan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan ( $X_1$ ), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ( $X_2$ ) dan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi ( $X_3$ ), berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat/IPM (Y). Hasil ini didukung oleh hasil Koefisien determinasi atau  $R^2 = 0.763403$  memiliki arti bahwa 76,34 persen variasi tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali (IPM) dapat dijelaskan oleh variasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sedangkan sisanya 23, 66 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan pada model.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhliwayo (2001), Jha *et al.* (2002), Chakraborty (2003) dan Syalkahfi (2016).

Dalam pembangunan ekonomi daerah, proses majunya pertumbuhan suatu daerah sering ditunjukkan dengan tingkat pertambahan PDRB dan APBD. Pembangunan daerah dengan APBD merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Maryani (2010) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia. Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM. Selain anggaran untuk sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan, anggaran pengeluaran daerah berupa belanja modal dan belanja pegawai dapat pula berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Belanja pegawai dianggap dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli aparatur daerah yang termasuk tinggi memberikan *multiplier effect* terhadap masyarakat di sekitarnya, yang kemudian mempercepat perputaran perekonomian masyarakat.

Nilai  $t$  hitung untuk pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan adalah 4,223. Nilai ini lebih besar dari nilai  $t$  tabel, yaitu 1,676 ( $t$  hitung = 4,223 >  $t$  tabel = 1,676), dengan probabilitas/signifikansi sebesar  $0,0001 < 0,05$ . berarti bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Provinsi Bali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhliwayo (2001), Jha *et al.* (2002), Chakraborty (2003), Maryani (2012), Dianaputra dan Aswitari (2017), dan tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Victor (2003), Rudy (2011), Winarti (2014), Anwar (2015).

Menurut Mankiw (2008) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Menurut Schweke (2004), pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Artana Yasa dan Arka, 2015). Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berguna bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Nilai  $t$  hitung pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yaitu 2,451. Nilai ini lebih besar dari nilai  $t$  tabel, yaitu 1,676 ( $t$  hitung = 2,451 >  $t$  tabel = 1,676) dengan probabilitas/signifikansi sebesar  $0,0178 < 0,05$ . artinya pengeluaran

pemerintah di bidang kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Provinsi Bali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhliwayo (2001), Jha *et al.* (2002), Chakraborty (2003), Rudy (2011), Maryani (2012), Anwar (2015) dan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bilal (2012), Kahang dkk. (2016).

Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan tahun 2001 dalam Atmawikarta (2002) menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai sentral pembangunan. Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (*input*) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Dengan demikian menurut Atmawikarta (2002), terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kesehatan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara statistik diperkirakan bahwa setiap peningkatan 10 persen dari angka harapan hidup (AHH) waktu lahir akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 0,3–0,4 persen pertahun, jika faktor-faktor pertumbuhan lainnya tetap.

Nilai  $t$  hitung pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi adalah sebesar  $9,364 > t \text{ tabel} = 1,676$ , dengan probabilitas/signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . artinya pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Provinsi Bali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Victor (2003), Ranis (2004), Widodo dkk. (2011), Anwar (2015), Syalkahfi (2016) dan bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Misdawita dan Sari (2013) dan Arifin dkk. (2015).

Menurut Bastian (2001), berdasarkan penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor lain seperti pada infrastruktur juga akan meningkatkan kualitas prasarana fisik yang akan memacu terjadinya investasi ekonomi dan selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan. Dan berdasarkan teori dinyatakan bahwa ada hubungan dua arah (*two ways relationship*) antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dimana keduanya memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung. Sehingga kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui rumah tangga dan pemerintah.

Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat terus-menerus bertambah dalam jangka panjang. Menurut Sukirno (2006), pendapatan perkapita dapat digunakan untuk tiga tujuan berikut: (i) menentukan tingkat kesejahteraan yang

dicapai suatu negara pada suatu tahun tertentu; (ii) menggambarkan tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi dunia dan di berbagai negara; dan (iii) menunjukkan jurang pembangunan di antara berbagai negara.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Secara parsial pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan dari hasil analisis adalah pemerintah sebaiknya mengupayakan peningkatan pendanaan/pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali (IPM) tercapai sesuai harapan, karena pengeluaran pemerintah sangat menentukan pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa serta merupakan faktor utama yang terbukti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara/wilayah. Pengeluaran pemerintah Provinsi Bali maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali yang dianggarkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) perlu dikaji secara

seksama dimana tujuan serta pengeluaran anggaran benar-benar lebih diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Adelfina dan Jember, I Made. 2016 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005–2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.5. No.10 Oktober 2016. ISSN: 2303-0178
- Anwar, Syaiful. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indek Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kota Depok). *Tesis*. Program Pasca Sarjana, Universitas Gunadarma.
- Arifin, Mochammad Yuli, Petrus Edy Suswandi, Moh. Adenan, 2015, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. *Skripsi*. Universitas Hasanudin.
- Artana Yasa, I Komang Oka; Arka, Sudarsana. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Astri, Meylina. 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*.1(1).
- Badrudin, Rudy dan Khasanah, Mufidhatul, 2011, Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. 9(1): h: 23-30.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada.
- Bilal, A. Wahid, 2012, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2010, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1626>.

- BPS. 2014. *Bali Dalam Angka 2010- 2014*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Chakraborty, Lekha S. 2003. *Public Expenditure and Human Development : An Empirical Investigation, Journal of Human Development*, National Institute of Public Finance and Policy, India, [www.nipfp.org.in](http://www.nipfp.org.in).
- Danawati, Sri. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Volume 5 No. 7. ISSN: 2337-3067
- Delavallade, Clara. 2006. Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries. *Journal of Economics and Finance*.30(2): pp: 222-239.
- Dewi, Feby Shinta. 2017. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi Kota Denpasar Periode Tahun 1994-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Volume 6, No.1, Januari 2017. ISSN: 2303-0178
- Dewi, Nyoman Lilya Santika dan Sutrisna, I Ketut. 2014. Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *EJurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume. 3, No. 3. Universitas Udayana.
- Dhliwayo, Rogers. 2001. *The Impact of Public Expenditure Management Under ESAP on Basic Social Service: Health and Education, SAPRI/Zimbabwe*.[www.saprin.org/zimbabwe/research/zim\\_public\\_exp](http://www.saprin.org/zimbabwe/research/zim_public_exp).
- Dianaputra, I Gede Komang Angga dan Aswitari, Luh Putu. 2017. Pengaruh Pembiayaan Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Perumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015. *E-Jurnal EP Unud*, 6(3): h: 115-146.
- Finkayana, I Putu Arya dan Dewi, Made Heny Urmila. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indikator Komposit Ipm Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2013. *E-Jurnal EP Unud*, 5(7): h: 861-881.
- Hariwan, Peggy; Swaningrum, Ayu. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186.

- Hukom, Alexandra. Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Jha, Raghendra, Biswal, Bagala and Biswal, Urvashi D .2002.*An Empirical of the Impact Public Expenditure on Education and Helath on Poverty in Indian States*. JEL Classification.Queen”s University. Canada: [www.anu.edu.au](http://www.anu.edu.au).
- Kahang, Merang. Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, 2016, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 18(2).
- Kuncoro, Mudradjat. 2000. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Edisi Pertama. Yogyakarta.UPP AMP YKPN.
- Kurniawan, Jarot. Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], july 2016. ISSN 2303-0186.
- Maria, K, Johana. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.19(1): h: 25-41.
- Maryani, Tri. 2012. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Misdawita dan Sari, A. Arini Putri, 2013, Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah d Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pengeluaran Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 4(2): h: 147 – 161
- Muhammad, Mar’ie. 2003. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Koran Tempo.[www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id).
- Purnami, Ni Made Sasih dan Saskara, Ida Ayu Nyoman. 2016. Analisis Pengaruh Pendidikan dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.5, No.11 November 2016. ISSN: 2303-0178
- Ranis, Gustav. 2004. *Human Development and Economic Growth, Center Discussion Paper No. 887, EconomicGrowthCenter*: Yale University, [www.econ.yale.edu/~egcenter](http://www.econ.yale.edu/~egcenter).

- Sahrah, Alimartus. 2007. *Memberdayakan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Bangsa*. Pidato Dies Natalis Unwama ke XXI, Yogyakarta.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Terakreditasi. Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 1(1): h:103 – 124.
- Septiana.M., Sanggelorang, M., Rumat, Vekie,A. dan Siwu, HanlyF.DJ., Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2): h: 1-11.
- Setyari, Ni Putu Wiwin. Evaluasi Dampak Kredit Mikro Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia: Analisa Data Panel.*Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], oct. 2012. ISSN 2303-0186.
- Silva, Indunil De and Sudarno Sumarto. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50 (2):227-42.
- Soejoto, Ady.Waspodo Tjipto Subroto, Suyanto. 2015. Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 763-771.
- Sofilda, Eleonora. Nurhayati, Muhammad Zilal Hamzah. 2015. Government Spending Contributions on per Capita Income and its Effect toward the Human Development Index (Comparative Study between Western Indonesia and Central & East Indonesia). *Journal of Social and Development Sciences*, 6(3): pp: 43-49.
- Sudiharta, Putu Seruni Pratiwi dan Sutrisna, I Ketut. 2014. Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 3, No. 10, Oktober 2014. ISSN: 2303-0178
- Sukirno, Sadono. 2001. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Swandewi, Anak Agung Istri Agung. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Universitas Udayana*. 3(7), pp: 356-376.

- Syalkahfi, M. Alyuriza, 2016, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 1999-2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Todaro, Michael P. 2000. *Economic Development, sevent edition*. Longman: New York and Essex.
- Treena Wu. 2013. Constrains to Human Capital Investment in Developing Countries: Using The Asian Financial Crisis in Indonesia as a Natural Experiment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Volume 49, No. 1, 2013. ISSN: 1472-7234
- Victor, Pekpekai. 2003. Peranan Anggaran Belanja dan Pembangunan Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Provinsi Papua 1990 – 1999). *Tesis S-2. Program Pascasarjana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Tidak dipublikasikan.
- Widodo, Adi., Waridin, Waridin., dan Kodoatie, Johanna Maria. 2011. Analisis Pengaruh pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. 1(1), h: 25-42.
- Wijayanti , Ni Kadek Herni dan Darsana, Ida Bagus. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal EP Unud*, 4(3), h: 1164-1193.
- Wirawan, Nata. 2014. *Cara Mudah Memahami Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Denpasar: Keraras Emas.
- Yefriza. 2015. Managing Public Health Expenditure in Indonesia. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. Volume 51, No.1. 2015. ISSN: 1472-7234